

Analisis Kualitas Website SIPONGI⁺ sebagai Media Informasi Pemerintah dalam Perspektif *E-Government* dan *Good Governance*

Utami Nur^{1*}, Adila Puspa Hestiantini², Dita Purnama³

^{1,2,3} Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia

Email Koresponden: utaminur@fisip.untan.ac.id*

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat. Sistem Monitoring Karhutla (SIPONGI⁺) merupakan platform digital pemerintah yang menyediakan informasi mengenai kondisi karhutla, termasuk titik panas (*hotspot*). Oleh karena itu, kualitas teknis website menjadi penting untuk mendukung akses masyarakat terhadap informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas teknis website SIPONGI⁺ sebagai media informasi pemerintah mengenai karhutla serta melihat keterkaitannya dengan pemanfaatan *E-Government* dan prinsip *Good Governance*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi hasil audit teknis website menggunakan *PageSpeed* melalui <https://web.dev/measure/>. Pengukuran dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu *Performance*, *Accessibility*, *Best Practices*, dan *Search Engine Optimization* (SEO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa website SIPONGI⁺ memperoleh nilai rata-rata 80,5 dengan kategori baik. Nilai *Performance* sebesar 60, *Accessibility* sebesar 87, *Best Practices* sebesar 92, dan SEO sebesar 83. Capaian tersebut menunjukkan bahwa SIPONGI⁺ secara umum memiliki kualitas teknis yang cukup baik sebagai media informasi digital pemerintah, terutama pada aspek *Best Practices*, *Accessibility*, dan SEO. Namun, aspek *Performance* masih memerlukan peningkatan. Dalam perspektif *E-Government* dan *Good Governance*, SIPONGI⁺ mendukung penyediaan dan keterbukaan akses informasi publik mengenai karhutla. Optimalisasi performa website diperlukan agar penyampaian informasi dapat berlangsung secara lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci : *E-Government*; *Good Governance*; Karhutla; Kualitas Website; SIPONGI⁺

Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang berdampak pada ekosistem, kesehatan, aktivitas sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat (Synersia, 2026). Dalam penanganannya, informasi mengenai titik panas (*hotspot*) dan kondisi wilayah yang terindikasi mengalami kebakaran diperlukan untuk mendukung pemantauan pemerintah sekaligus membantu masyarakat mengetahui kondisi karhutla di



sekitarnya. Seiring perkembangan teknologi informasi, penyediaan informasi karhutla juga dilakukan melalui media digital pemerintah (Nur & Pratiwi, 2025). Website memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara mandiri, terutama karena informasi karhutla bersifat dinamis dan dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Oleh karena itu, kualitas media digital menjadi penting agar informasi dapat diakses dengan mudah dan nyaman. Salah satu platform pemerintah yang menyediakan informasi pemantauan karhutla adalah Sistem Monitoring Karhutla (SIPONGI+) yang dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Kehutanan <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/>. Platform ini menyediakan informasi mengenai karhutla, termasuk titik panas (*hotspot*), yang dapat diakses secara daring. Dengan demikian, SIPONGI+ tidak hanya digunakan dalam pemantauan pemerintah, tetapi juga menjadi media digital penyedia informasi karhutla bagi masyarakat (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan, 2026).

Gambar 1. Tampilan Website SIPONGI+ Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan



Sumber : Website SIPONGI+, 2026

Pemanfaatan website pemerintah berkaitan dengan penerapan *E-Government*, yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik (Fentika et al., 2026). Melalui media digital, pemerintah dapat menyediakan informasi secara daring dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Dalam perspektif *Good Governance*, keterbukaan dan akses terhadap informasi merupakan bagian penting dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan (Suriadi, 2025). Oleh karena itu, platform digital pemerintah seperti SIPONGI+ dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam penyediaan informasi publik. Dalam penelitian ini, konsep *E-Government* dan *Good Governance* digunakan sebagai landasan konseptual dan tidak diukur sebagai variabel penelitian.

Website pemerintah sebagai media informasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kemampuan website dalam menyediakan akses yang mudah, cepat, dan efektif. Permasalahan pada kecepatan pemuatan halaman, aksesibilitas, penerapan praktik teknis, maupun kemudahan ditemukan melalui mesin pencari dapat memengaruhi pengalaman pengguna dalam memperoleh informasi (Delang & Munandar, 2022). Kondisi tersebut menjadi semakin relevan dalam penyediaan informasi karhutla karena informasi mengenai titik panas (*hotspot*) dan kondisi kebakaran bersifat dinamis. Masyarakat membutuhkan media digital yang memungkinkan informasi tersebut diakses secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, kualitas teknis website SIPONGI+ menjadi aspek yang penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan fungsi website sebagai media informasi pemerintah.

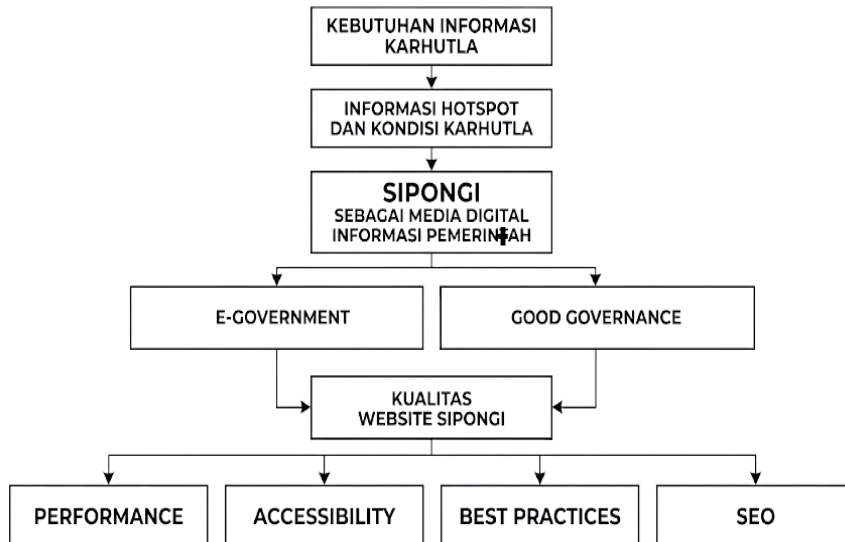
Kualitas website dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan, baik berdasarkan persepsi pengguna maupun melalui pengukuran teknis. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian mengenai website pemerintah adalah *Web Dev/Measure Page Quality* melalui empat aspek, yaitu *Performance*, *Accessibility*, *Best Practices*, dan *Search Engine Optimization* (SEO). Penelitian dari Delang & Munandar (2022) menganalisis kualitas website pemerintah kabupaten di Pulau Flores menggunakan empat aspek tersebut. Penelitian Permatasari & Munandar, (2022) juga menggunakan pendekatan serupa untuk mengevaluasi website pelayanan publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Performance* berkaitan dengan

kinerja dan proses pemuatan halaman, *Accessibility* berkaitan dengan kemudahan website digunakan dan diakses oleh berbagai pengguna, *Best Practices* berkaitan dengan penerapan praktik teknis yang direkomendasikan, sedangkan SEO berkaitan dengan aspek teknis yang mendukung keterjangkauan website melalui mesin pencari.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa SIPONGI⁺ memiliki peran penting sebagai media penyedia informasi dan data dalam mendukung pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian terdahulu telah mengkaji SIPONGI⁺ dari berbagai perspektif, antara lain evaluasi *usability* website menggunakan metode WEBUSE, evaluasi pengalaman pengguna dalam pengembangan aplikasi, serta pemanfaatan sistem SIPONGI⁺ dalam mendukung kolaborasi pengelolaan informasi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, data yang bersumber dari SIPONGI⁺ juga telah dimanfaatkan dalam identifikasi dan pemetaan titik panas (*hotspot*) untuk mendukung pemantauan kebakaran hutan dan lahan, sementara penelitian lainnya mengembangkan aplikasi untuk mendukung akuisisi data dalam kegiatan patroli terpadu kebakaran hutan dan lahan. Meskipun penelitian mengenai SIPONGI⁺ telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, kajian yang secara khusus menganalisis kualitas teknis website SIPONGI⁺ sebagai media penyediaan informasi kebakaran hutan dan lahan masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek *usability* dan pengalaman pengguna, pemanfaatan data *hotspot*, pengembangan aplikasi pendukung patroli, pemetaan, serta kolaborasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kualitas teknis website SIPONGI⁺ masih diperlukan untuk mengetahui sejauh mana website mampu menyediakan akses informasi yang cepat, mudah diakses, dan memiliki kualitas teknis yang memadai bagi pengguna (Ajeng et al., 2024; Robiansyah & Biantary, 2026; Sastypratiwi et al., 2023; Sastypratiwi & Novriando, 2022; Wibowo et al., 2022; Wicaksono et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kualitas teknis website melalui empat aspek, yaitu *Performance*, *Accessibility*, *Best Practices*, dan *SEO*. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis kualitas teknis serta objek penelitian, yaitu SIPONGI⁺ sebagai platform digital

pemerintah yang menyediakan informasi mengenai pemantauan kebakaran hutan dan lahan.

Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan SIPONGI⁺ sebagai media digital pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan, khususnya informasi *hotspot* dan kondisi karhutla. Konsep *E-Government* dan *Good Governance* digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami pemanfaatan teknologi digital pemerintah serta pentingnya keterbukaan dan akses terhadap informasi publik. Selanjutnya, kualitas teknis website SIPONGI⁺ dianalisis melalui empat aspek, yaitu *Performance*, *Accessibility*, *Best Practices*, dan *SEO*. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas teknis SIPONGI⁺ sebagai media informasi pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas teknis SIPONGI⁺ serta aspek yang masih perlu diperhatikan dalam mendukung penyediaan informasi digital pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Objek penelitian adalah website Sistem Monitoring Karhutla (SIPONGI⁺) sebagai media digital pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk

informasi titik panas (*hotspot*). Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi hasil audit teknis website menggunakan perangkat audit berbasis *Lighthouse*. Pengukuran kualitas teknis website dilakukan berdasarkan empat aspek sebagai berikut:

Tabel 1. Aspek Pengukuran Kualitas Website SIPONGI⁺

Aspek	Fokus Pengukuran
<i>Performance</i>	Kinerja dan kecepatan pemuatan halaman website
<i>Accessibility</i>	Kemudahan website diakses dan digunakan oleh berbagai pengguna
<i>Best Practices</i>	Penerapan praktik teknis yang direkomendasikan
SEO	Aspek teknis yang mendukung keterjangkauan website melalui mesin pencari

Sumber: Diadaptasi dari *Web.dev/Lighthouse* diakses melalui artikel Penelitian Permatasari & Munandar, (2022)

Pengumpulan data dilakukan dengan memasukkan URL website SIPONGI⁺ ke dalam perangkat audit, menjalankan proses pengukuran, dan mendokumentasikan skor yang diperoleh pada setiap aspek. Hasil audit berupa skor dengan rentang 0–100 yang kemudian dikategorikan berdasarkan kriteria yang digunakan oleh Cheisviyanny dkk. (2018) dalam Penelitian Delang & Munandar (2022)

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kualitas Website

Skor (%)	Kategori
90–100	Berkualitas
50–89	Cukup Berkualitas
0–49	Kurang Berkualitas

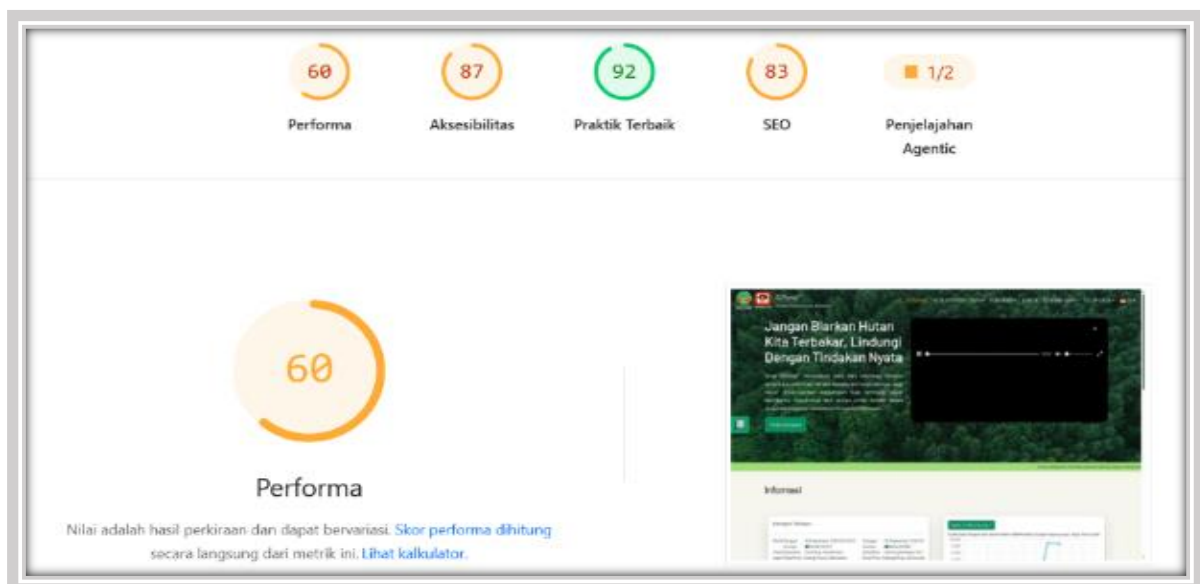
Sumber: Penelitian Delang & Munandar (2022)

Data dianalisis secara deskriptif dengan menyajikan skor dan kategori pada masing-masing aspek. Hasil pengukuran kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan kualitas teknis website SIPONGI⁺ sebagai media informasi digital pemerintah mengenai karhutla. Keempat aspek pengukuran digunakan untuk menilai kualitas teknis website, sedangkan konsep *E-Government* dan *Good Governance* digunakan sebagai landasan konseptual dalam memahami fungsi SIPONGI⁺ sebagai media digital pemerintah dan penyediaan akses informasi publik, bukan sebagai indikator yang diukur secara langsung.

Pembahasan/hasil

Penelitian ini menganalisis kualitas website SIPONGI⁺ sebagai salah satu media digital pemerintah dalam menyediakan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. Pengukuran dilakukan menggunakan *PageSpeed Insights* dengan empat indikator utama, yaitu *Performance*, *Accessibility*, *Best Practices*, dan *Search Engine Optimization (SEO)*. Hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan penerapan *E-Government* dan prinsip *Good Governance* dalam penyediaan informasi publik.

Gambar 2. : Hasil pengukuran *PageSpeed Insights*



Sumber: Hasil pengukuran *PageSpeed Insights*, 2026.

Berdasarkan gambar di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Website SIPONGI⁺

Indikator	Nilai	Kategori
Performance	60	Perlu peningkatan
Accessibility	87	Baik
Best Practices	92	Baik
SEO	83	Baik
Rata-rata	80,5	Baik

Sumber: Hasil pengukuran *PageSpeed Insights*, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, website SIPONGI⁺ memperoleh nilai rata-rata 80,5 dari empat indikator yang dianalisis. Capaian tertinggi terdapat pada aspek *Best Practices* dengan nilai 92, sedangkan nilai terendah terdapat pada aspek *Performance* dengan nilai 60. Perbedaan capaian tersebut

menunjukkan bahwa kualitas website tidak hanya ditentukan oleh satu aspek, tetapi merupakan kombinasi antara performa teknis, aksesibilitas, praktik pengembangan website, dan kemudahan informasi ditemukan melalui mesin pencari.

A. Performance

Aspek *Performance* memperoleh nilai 60, yang menjadi nilai terendah dibandingkan tiga indikator lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa teknis website SIPONGI⁺ masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. *Performance* berkaitan dengan kemampuan website dalam memuat halaman dan menampilkan konten kepada pengguna secara efisien. Dalam pelayanan informasi publik, aspek ini menjadi penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diakses dengan cepat, terutama ketika informasi berkaitan dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif *E-Government*, keberadaan website pemerintah tidak cukup hanya ditunjukkan dengan tersedianya informasi secara daring. Kualitas layanan digital juga dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat ketika mengakses informasi tersebut (Delang & Munandar, 2022). Temuan ini berkaitan dengan prinsip *Good Governance*, terutama efektivitas dan responsivitas (Nur et al., 2025). Efektivitas pelayanan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah menyampaikan informasi melalui media yang dapat digunakan secara efisien. Sementara itu, responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan akses informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suriadi, 2025). Oleh karena itu, nilai *Performance* sebesar 60 menunjukkan bahwa penguatan aspek teknis website masih diperlukan agar SIPONGI⁺ dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelayanan informasi publik. Dengan demikian, aspek *Performance* menjadi salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan SIPONGI⁺. Optimalisasi kecepatan pemuatan halaman dan efisiensi elemen website dapat meningkatkan kualitas interaksi antara masyarakat dengan layanan informasi pemerintah berbasis digital.

B. Accessibility

Pada indikator *Accessibility*, website SIPONGI⁺ memperoleh nilai 87. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum website telah memiliki tingkat aksesibilitas yang baik, meskipun masih terdapat aspek yang dapat disempurnakan. Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam mengakses dan menggunakan informasi yang tersedia pada website. Dalam perspektif *E-Government*, aksesibilitas merupakan aspek penting karena digitalisasi pelayanan pemerintah ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan (Sulthony et al., 2025). Website pemerintah idealnya dapat digunakan oleh masyarakat dengan karakteristik dan perangkat yang beragam. Dengan demikian, kualitas turut menentukan sejauh mana teknologi digital dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Nilai 87 menunjukkan bahwa SIPONGI⁺ telah memiliki dasar yang cukup baik dalam menyediakan akses terhadap informasi secara digital. Kondisi tersebut mendukung fungsi website sebagai media penyebarluasan informasi publik. Meskipun demikian, capaian tersebut belum berarti bahwa seluruh aspek aksesibilitas telah sempurna. Perbaikan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar informasi yang tersedia dapat dijangkau oleh masyarakat secara lebih luas.

Jika dikaitkan dengan *Good Governance*, aspek *Accessibility* berhubungan dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan akses atau kesetaraan pelayanan (Rizkika, 2025). Informasi publik pada dasarnya perlu tersedia bagi masyarakat secara luas tanpa hambatan teknis yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas SIPONGI⁺ dapat mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif karena teknologi digunakan untuk memperluas, bukan membatasi, akses masyarakat terhadap informasi pemerintah.

C. Best Practices

Indikator *Best Practices* memperoleh nilai 92, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam pengukuran website SIPONGI⁺. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara teknis website telah menerapkan sebagian besar

praktik yang direkomendasikan dalam pengembangan website modern. Aspek ini berkaitan dengan berbagai praktik teknis yang mendukung keamanan, keandalan, dan kualitas pengelolaan website. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dari sisi praktik teknis, SIPONGI⁺ telah memiliki fondasi yang relatif baik sebagai platform digital pemerintah. Hal ini penting karena website pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi, tetapi juga menjadi salah satu sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (Amanda et al., 2026). Keandalan dan penerapan praktik teknis yang baik dapat mendukung keberlangsungan layanan informasi yang disediakan melalui website.

Dalam perspektif *E-Government*, nilai *Best Practices* sebesar 92 menunjukkan adanya dukungan aspek teknis terhadap penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis digital. Kualitas teknis menjadi bagian penting dalam membangun layanan digital yang dapat digunakan secara berkelanjutan (Isadi et al., 2026). Semakin baik praktik teknis yang diterapkan, semakin kuat pula fondasi website dalam menjalankan fungsi sebagai media pelayanan informasi pemerintah. Sementara itu, dalam perspektif *Good Governance*, aspek ini dapat dikaitkan dengan akuntabilitas, dimana prinsip tersebut berkaitan dengan informasi publik (Tinenti et al., 2026). Pengelolaan website pemerintah membutuhkan standar teknis yang dapat mendukung keandalan layanan. Pemerintah tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut dikelola secara layak. Dengan nilai 92, SIPONGI⁺ menunjukkan capaian yang relatif baik dalam aspek tersebut, meskipun evaluasi dan pemeliharaan tetap diperlukan secara berkala.

D. Search Engine Optimization (SEO)

Aspek *Search Engine Optimization (SEO)* memperoleh nilai 83. Nilai tersebut menunjukkan bahwa website SIPONGI⁺ telah memiliki tingkat optimasi yang baik dalam mendukung kemudahan informasi untuk ditemukan melalui mesin pencari, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. SEO memiliki relevansi penting dalam penyediaan informasi

publik karena keberadaan informasi pada website pemerintah belum tentu menjamin informasi tersebut mudah ditemukan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat sering menggunakan mesin pencari sebagai pintu awal untuk memperoleh informasi tertentu. Oleh karena itu, semakin baik optimasi SEO, semakin besar peluang informasi yang disediakan oleh pemerintah ditemukan oleh pengguna internet.

Dalam perspektif *E-Government*, capaian SEO sebesar 83 menunjukkan bahwa SIPONGI tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi digital, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan visibilitas informasi pemerintah di ruang digital. Hal tersebut mendukung fungsi *E-Government* sebagai sarana memperluas jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat (Hermawan & Halbi, 2025). Aspek SEO juga dapat dikaitkan dengan prinsip transparansi dalam *Good Governance*. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menyediakan informasi, tetapi juga dengan kemudahan masyarakat dalam menemukan dan memperoleh informasi tersebut (Dahlan et al., 2026). Website yang mudah ditemukan akan memperbesar peluang masyarakat mengakses sumber informasi resmi pemerintah dibandingkan hanya mengandalkan sumber informasi lain yang belum tentu memiliki tingkat keakuratan yang sama.

Dalam konteks SIPONGI⁺, aspek tersebut menjadi semakin relevan karena informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan memiliki kepentingan publik. Informasi yang mudah ditemukan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dari sumber pemerintah dan meningkatkan keterjangkauan informasi publik secara digital.

E. Keterkaitan Website SIPONGI⁺ dengan *E-Government* dan *Good Governance*

Hasil pengukuran terhadap empat indikator menunjukkan bahwa SIPONGI⁺ telah memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung pemanfaatannya sebagai media *E-Government*. Nilai *Accessibility* sebesar 87, *Best Practices* sebesar 92, dan SEO sebesar 83 menunjukkan capaian yang relatif baik pada aspek aksesibilitas, praktik teknis, dan kemudahan informasi ditemukan. Sementara itu, nilai *Performance* sebesar 60

menunjukkan bahwa performa teknis masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *E-Government* melalui SIPONGI+ tidak cukup dipahami hanya berdasarkan keberadaan website pemerintah. Digitalisasi informasi juga perlu memperhatikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penyampaian informasi ke publik, pemerintah tidak boleh pasif (Ferdiyanti et al., 2026). Oleh sebab itu dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, keberadaan SIPONGI+ memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kondisi karhutla, termasuk informasi titik *hotspot*. Akses terhadap informasi tersebut menjadi penting terutama pada periode terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi yang terindikasi memiliki titik panas melalui platform digital pemerintah tanpa harus memperoleh informasi secara langsung dari instansi pemerintah, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3 Peta Hostpot SIPONGI+



Sumber : Website SIPONGI+, 2026

<https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/peta> (Diakses 18 September 2026, 17.22 WIB)

Informasi titik *hotspot* memiliki manfaat praktis bagi masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengetahui wilayah yang terindikasi memiliki titik panas sehingga masyarakat dapat lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya karhutla di lingkungan sekitarnya. Bagi

pemerintah dan pihak terkait, informasi *hotspot* juga dapat menjadi salah satu sumber informasi awal dalam melakukan pemantauan kondisi wilayah dan menentukan kebutuhan tindak lanjut di lapangan. Dengan demikian, penyediaan informasi *hotspot* melalui SIPONGI⁺ tidak hanya berfungsi sebagai publikasi data, tetapi juga memiliki nilai informatif dalam mendukung kesiapsiagaan dan respons terhadap karhutla.

Kemudahan akses terhadap informasi *hotspot* tersebut juga berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Informasi mengenai kondisi karhutla yang dapat diakses masyarakat melalui SIPONGI⁺ menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membuka informasi yang relevan dengan kondisi lingkungan dan potensi kebakaran kepada publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi karhutla melalui kanal digital pemerintah. Hal ini memperkuat fungsi SIPONGI⁺ sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan informasi kebakaran hutan dan lahan.

Jika dikaitkan dengan *Good Governance*, keempat indikator tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa prinsip tata kelola pemerintahan. Aspek *Performance* berkaitan dengan efektivitas dan responsivitas karena informasi perlu dapat diakses secara efisien. *Accessibility* berkaitan dengan inklusivitas dan kesetaraan akses karena informasi pemerintah perlu dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. *Best Practices* mendukung keandalan pengelolaan website, sedangkan SEO berkaitan dengan transparansi karena membantu masyarakat menemukan informasi pemerintah melalui mesin pencarian.

Dengan demikian, kualitas website SIPONGI⁺ dapat dipandang sebagai salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam membangun pelayanan informasi publik berbasis digital. Kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi *hotspot* secara relatif mudah, khususnya pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, memperkuat fungsi SIPONGI⁺ sebagai media keterbukaan informasi publik. Informasi tersebut dapat mendukung peningkatan kewaspadaan masyarakat sekaligus menyediakan informasi

awal yang dapat dimanfaatkan dalam pemantauan dan respons terhadap potensi karhutla.

Secara keseluruhan, website SIPONGI⁺ memperoleh rata-rata nilai 80,5 pada empat indikator pengukuran dan menunjukkan capaian yang relatif baik. Meskipun demikian, nilai *Performance* sebesar 60 menunjukkan bahwa aspek kecepatan dan efisiensi website masih perlu ditingkatkan. Perbaikan tersebut penting agar keterbukaan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan, termasuk informasi *hotspot*, dapat disampaikan secara lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, SIPONGI⁺ dapat berfungsi tidak hanya sebagai media informasi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen digital yang mendukung *E-Government*, keterbukaan informasi publik, dan *Good Governance*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, website SIPONGI⁺ memperoleh rata-rata nilai 80,5 pada empat indikator PageSpeed Insights, yaitu *Performance* sebesar 60, *Accessibility* 87, *Best Practices* 92, dan SEO 83. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa SIPONGI⁺ memiliki kualitas teknis yang relatif baik sebagai media digital pemerintah dalam menyediakan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Dalam perspektif *E-Government*, SIPONGI⁺ mendukung penyediaan informasi publik melalui media digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Keberadaan informasi mengenai kondisi karhutla, termasuk titik *hotspot*, juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi secara lebih cepat dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi informasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi pemerintah, tetapi juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana.

Dalam perspektif *Good Governance*, pemanfaatan SIPONGI⁺ dapat mendukung keterbukaan informasi, transparansi, efektivitas, responsivitas, dan aksesibilitas informasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi karhutla secara langsung melalui informasi yang tersedia pada platform digital pemerintah. Meskipun demikian, nilai *Performance* sebesar 60 menunjukkan

bahwa aspek kecepatan dan efisiensi website masih perlu dioptimalkan agar akses informasi dapat berlangsung secara lebih cepat dan nyaman. Dengan demikian, SIPONGI⁺ telah menunjukkan peran sebagai instrumen *E-Government* yang mendukung keterbukaan informasi publik dan penerapan *Good Governance*, khususnya melalui penyediaan informasi karhutla dan titik hotspot yang dapat diakses masyarakat. Penguatan aspek teknis website tetap diperlukan agar keterbukaan informasi tersebut semakin efektif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ajeng, Kumalawati, R., Nurlina, & Hadi, I. K. (2024). Pemetaan Sebaran Titik Hotspot Menggunakan Arcgis di Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(3), 271–277. <https://doi.org/10.55123/insologi.v3i3.3485>
- Amanda, I., Panggur, J., Watamutu, M. F. X. M., Rivan, M., Luh, M., & Moduhina, S. M. (2026). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan e-KTP di Kota Kupang terhadap layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja. Pan dan Fan (2023). *Student Scientific Creativity Journal*, 4(4), 18–28.
- Dahlan, D., Syakhira, N. H., Ramadhan, R., & Manita, R. J. (2026). Efektivitas Sistem Pengaduan Masyarakat Terintegrasi melalui SP4N-LAPOR! dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Tanah Datar Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 8(1), 80–91.
- Delang, T. O., & Munandar, A. (2022). Kualitas Situs Website Pemerintahan Daerah Kabupaten Di. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 44–52.
- Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan. (2026). *Jangan Biarkan Hutan Kita Terbakar, Lindungi Dengan Tindakan Nyata*. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan. <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/>
- Fentika, F., Widayat, R. M., Dermawan, M. A., & Ali, M. (2026). Implementasi Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik Melalui Website Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 5(1), 85–94.

- Ferdiyanti, S. H., Rahman, G., & Fatori, A. (2026). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kependudukan Berbasis E-Government Di Kecamatan. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 46–60.
- Hermawan, A., & Halbi. (2025). Digitalisasi Desa Bala: Pengembangan Website sebagai Wadah Informasi dan Layanan Publik. *MACOA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 57–65.
- Isadi, M., K, A. B., I, A. A., W, I. L., S, E. F., Wahyuningsih, R., A, S. N., & S, N. N. (2026). Pengembangan Website Desa Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akses Informasi Publik. *AKM Aksi Kepada Masyarakat*, 6(2), 831–844.
- Nur, U., Mutiarin, D., Jovita, H. D., Palomares, P. P., & Isolana, J. B. (2025). Role of Good Governance Indicators in Controlling Corruption. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(1), 83–99. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i1.22287>
- Nur, U., & Pratiwi, D. (2025). Transformasi Digital Layanan Perizinan Publik di Kabupaten. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 28(02), 114–125.
- Permatasari, L. I., & Munandar, A. (2022). Evaluasi Kinerja Website Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Pada Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 1–19.
- Rizkika, A. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus di Puskesmas Ciketing Udik. *Al Khalifah : Jurnal Kajian Sosiopolitik Dan Hukum*, 1(2), 226–237.
- Robiansyah, Z., & Biantary, P. (2026). Identifikasi Hotspot Pada Kawasan Konservasi Di Cagar Alam Muara Kaman Sedulang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023. *JAKT: Jurnal Agroteknologi Dan Kehutanan Tropika*, 4(2), 133–146.
- Sastypratiwi, H., Muhardi, H., & Ulumi, D. I. (2023). Incorporating User Experience Evaluation into Application Design for Optimal Usability. *Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, Dan Rekayasa Komputer*, 22(3), 529–538. <https://doi.org/10.30812/matrik.v22i3.2793>
- Sastypratiwi, H., & Novriando, H. (2022). Evaluasi Usability Pada Website Monitoring Kebakaran Hutan Evaluation Of Usability In Monitoring Forest Websites Using The Webuse Method. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(5).

<https://doi.org/10.25126/jtiik.202295436>

- Sulthony, A., Khan, A., Nugroho, T. C., Eka, A., & Ramadhan, M. N. (2025). Pelayanan Publik Inklusif di Era Digital : Studi Aksesibilitas Website Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas Inclusive Public Service in the Digital Era : A Study on the Accessibility of Local Government Websites for Persons with Disabilities. *Pena Bangsa : Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(2), 27–43. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.307>
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- Synergia. (2026). *Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Krisis Ekologis, Kesehatan, dan Tata Kelola*. Synergia. <https://synergia.org/kebakaran-hutan-dan-lahan-karhutla-krisis-ekologis-kesehatan-dan-tata-kelola/>
- Tinenti, J. J., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2026). Urgensi Keterbukaam Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Prinsip Good Governance dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Petitum Law Journal*, 3(1), 457–471.
- Wibowo, D. S., Sitanggang, I. S., Kurniawan, I., & Wulandari. (2022). Mobile application for data acquisition in integrated forest and land fires patrols. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 11(4), 653–661.
- Wicaksono, A., Prihatin, P. S., Febrian, R. A., & Mulianto, B. (2024). Sipongi System : Navigating and fostering collaboration in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(3), 1–20.

Internet

- Synergia. (2026). *Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Krisis Ekologis, Kesehatan, dan Tata Kelola*. Synergia. <https://synergia.org/kebakaran-hutan-dan-lahan-karhutla-krisis-ekologis-kesehatan-dan-tata-kelola/> (diakses pada tanggal 18 September 2026)
- Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan. (2026). *Jangan Biarkan Hutan Kita Terbakar, Lindungi Dengan Tindakan Nyata*. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan. <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/> (diakses pada tanggal 18 September 2026)